



Dikotomi Kerelawanan Dan Profesional Di Dunia Pendidikan: Mencari Titik Temu Antara Idealisme Dan Realitas

Siti Mariyah¹, Nazaruddin²

IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: riamardia90@gmail.com, nazaruddinstaimu@gmail.com

Article received: 02 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 05 Mei 2025, Article published: 08 Mei 2025

ABSTRACT

The phenomenon of the dichotomy between volunteerism and professionalism in education raises debates about the role, competence and sustainability of education services in Indonesia. This research aims to analyze the dynamics of the relationship between education volunteers and professionals in the context of national education distribution, quality and accountability. Using a descriptive qualitative approach through a desk study, data was collected from books, journals, official documents and relevant research reports. The results show that volunteerism emerges from an altruistic spirit to address the education gap, especially in the 3T areas, while professionalism emphasizes quality standards, qualifications and welfare guarantees. Tensions arise when volunteers are perceived as emergency solutions or "cheap substitutes", while professionals get caught up in bureaucracy and lose their idealism. However, both can complement each other if supported by policies that encourage collaboration, continuous training, and a fair reward system. Therefore, the intersection between the two is important to build a participatory, inclusive and sustainable education ecosystem.

Keywords: Volunteerism, Professionalism, Education, Dichotomy, Collaboration

ABSTRAK

Fenomena dikotomi antara kerelawanan dan profesionalisme dalam dunia pendidikan memunculkan perdebatan mengenai peran, kompetensi, dan keberlanjutan layanan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara relawan pendidikan dan tenaga profesional dalam konteks distribusi, kualitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, data dikumpulkan dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerelawanan muncul dari semangat altruistik untuk menjawab kesenjangan pendidikan, terutama di daerah 3T, sementara profesionalisme menekankan pada standar mutu, kualifikasi, dan jaminan kesejahteraan. Ketegangan muncul ketika relawan dianggap sebagai solusi darurat atau "pengganti murah", sementara profesional terjebak dalam birokrasi dan kehilangan idealisme. Namun, keduanya dapat saling melengkapi jika didukung kebijakan yang mendorong kolaborasi, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penghargaan yang adil. Oleh karena itu, titik temu antara keduanya penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kerelawanan, Profesionalisme, Pendidikan, Dikotomi, Kolaborasi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan bangsa. Dalam realitas sosial yang kompleks, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dilaksanakan oleh negara melalui tenaga pendidik profesional, tetapi juga digerakkan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para relawan pendidikan. Di sinilah muncul suatu dikotomi yang menarik untuk dikaji: antara kerelawanan (*volunteerism*) dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kedua elemen ini memegang peran penting, namun memiliki karakteristik, orientasi, dan tantangan yang berbeda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: dapatkah kerelawanan dan profesionalisme berjalan berdampingan, ataukah keduanya justru saling menegasikan

Kerelawanan dalam dunia pendidikan biasanya lahir dari motivasi intrinsik, seperti keprihatinan terhadap ketimpangan akses pendidikan, semangat pengabdian kepada masyarakat, atau idealisme dalam membangun masa depan bangsa. Di Indonesia, geliat kerelawanan terlihat jelas melalui berbagai program seperti Indonesia Mengajar, Gerakan Literasi Nasional, dan komunitas pendidikan di daerah terpencil (Siregar, F, 2020).

Relawan pendidikan hadir di ruang-ruang kosong yang belum sepenuhnya dijangkau oleh sistem formal. Mereka berperan sebagai pengisi kekosongan tenaga pendidik, fasilitator literasi, mentor anak-anak marjinal, hingga agen perubahan sosial. Dalam banyak kasus, relawan bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga motivator, konselor, dan jembatan budaya antara dunia luar dan komunitas lokal. Namun, kerelawanan tidak lepas dari tantangan. Minimnya pelatihan pedagogis, keterbatasan logistik, dan tidak adanya jaminan kesejahteraan menjadikan kerja relawan rentan terhadap kelelahan emosional dan *burnout*. Selain itu, keberadaan mereka seringkali dianggap solusi temporer atas krisis struktural tenaga pendidik, bukan bagian dari sistem pendidikan yang terintegrasi (Unesco, 2021).

Profesionalisme dalam pendidikan mengacu pada keahlian, kompetensi, etika, dan tanggung jawab yang melekat pada profesi guru dan tenaga kependidikan. Guru sebagai profesi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan keilmuan, tetapi juga menjalankan tugasnya secara berkelanjutan dengan dukungan sistem karier, pelatihan, dan jaminan kesejahteraan.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan fungsi utama mentransformasikan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Hal ini diperkuat oleh keberadaan sertifikasi profesi guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), serta berbagai regulasi yang mengatur standar mutu tenaga pendidik. Namun, dalam praktiknya, profesionalisme kadang terjebak dalam rutinitas administratif dan birokratisasi pendidikan. Beban kerja administratif yang tinggi, minimnya ruang inovasi, dan sistem penilaian yang kaku membuat banyak guru kehilangan semangat pengabdian. Bahkan, sebagian guru merasa terjebak dalam sistem yang hanya menilai kinerja berdasarkan angka dan dokumen (Suryani A, 2019).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu kegiatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dokumen, laporan penelitian, dan media relevan lainnya (Mahmud, 2011; Sholeh, dalam Zed, 2008). Studi kepustakaan dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari identifikasi sumber, pengumpulan bahan, pembacaan mendalam, pencatatan informasi penting, hingga analisis dan penyusunan data ke dalam laporan penelitian (Nazir, 2003; Zed, 2008). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali teori dan informasi empiris yang relevan dengan topik secara mendalam, serta membangun kerangka berpikir yang kuat berdasarkan literatur yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa dikotomi adalah pembagian dua bagian, pembelahan dua bagian, atau bercabang dua bagian. Ada juga yang mendefinisikan dikotomi sebagai pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Menurut Baharuddin, menempatkan sesuatu pada dua kutub yang berlawanan sehingga sulit diintegrasikan adalah suatu contoh sikap dikotomi (Baharuddin, Umiarso, dan Sri Minarti, 2011).

Dikotomi antara kerelawanan dan profesionalisme dalam pendidikan tidak selalu bersifat antagonistik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketegangan dalam relasi keduanya. Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran relawan bisa menjadi ancaman terhadap status dan posisi guru profesional, terutama bila relawan dianggap “pengganti murah” di wilayah-wilayah yang kekurangan guru. Sebaliknya, ada pula anggapan bahwa profesionalisme yang terlalu birokratis kerap kehilangan ruh idealisme dan semangat pelayanan publik (Mufrod. B, 2008).

Dilema ini mencuat dalam kebijakan rekrutmen tenaga honorer, PPPK, dan program relawan nasional. Negara seringkali menggunakan relawan sebagai solusi darurat untuk mengatasi kekurangan guru, tanpa menyentuh akar permasalahan struktural seperti distribusi guru yang tidak merata, rekrutmen yang tidak transparan, atau sistem insentif yang belum adil. Meski begitu, banyak contoh kolaborasi yang menunjukkan bahwa kerelawanan dan profesionalisme bisa saling melengkapi. Di beberapa daerah, guru profesional bermitra dengan relawan literasi untuk memperkaya proses pembelajaran. Di sekolah-sekolah nonformal dan pendidikan alternatif, sinergi antara relawan dan profesional telah membuktikan bahwa pendidikan bisa berjalan secara kreatif dan partisipatif.

Kerelawanan dalam pendidikan sering kali muncul sebagai respons terhadap kesenjangan akses, kualitas, dan kehadiran negara dalam menjamin layanan pendidikan yang merata. Banyak komunitas dan individu yang secara

swadaya terlibat dalam aktivitas pendidikan, baik melalui kegiatan mengajar, pelatihan literasi, distribusi buku, hingga pendampingan psikososial.

Fenomena ini sangat kentara di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik menjadi masalah kronis. Program seperti Indonesia Mengajar, Gerakan Literasi Nasional, atau komunitas-komunitas seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah contoh nyata peran vital relawan dalam mendobrak sekat-sekat ketimpangan pendidikan.

Relawan membawa semangat yang tidak bisa digantikan oleh sistem birokratik. Mereka hadir dengan ketulusan, fleksibilitas, dan semangat inovatif. Namun, karena sifatnya tidak terikat, kerelawanan juga kerap menghadapi tantangan dalam hal kontinuitas, kompetensi, serta perlindungan hukum dan sosial. Dalam beberapa kasus, keberadaan relawan digunakan sebagai solusi jangka pendek oleh pemerintah atau lembaga donor, namun tanpa strategi keberlanjutan yang jelas.

Di satu sisi, kerelawanan dalam pendidikan adalah bentuk pengabdian yang lahir dari semangat altruistik. Banyak relawan yang terjun ke dunia pendidikan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), bukan karena iming-iming materi, tetapi karena panggilan nurani. Mereka percaya bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, apa pun kondisi geografis dan sosialnya. Para penggerak literasi, pengajar muda, dan komunitas-komunitas pendidikan akar rumput adalah contoh nyata dari wajah kerelawanan ini. Mereka mengisi kekosongan negara, menambal keterbatasan sistem, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang kerap terabaikan. Namun di sisi lain, profesionalisme dalam pendidikan menuntut standar kompetensi, kualifikasi, dan remunerasi yang layak. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai profesi memerlukan keahlian pedagogis, pengetahuan akademik, dan komitmen terhadap kode etik profesi. Dunia pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan semangat tanpa kompetensi. Profesionalisme hadir untuk menjamin kualitas, kesinambungan, dan akuntabilitas dalam proses belajar-mengajar. Tanpa tenaga profesional, sistem pendidikan rentan terhadap ketidakteraturan, ketimpangan mutu, dan rendahnya daya saing. Tentang profesional ini dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhiyallahu 'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disiasiakan?' ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." HR. Bukhari

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa sangat enting bagi kita untuk selalu memilih orang yang tepat untuk menjalankan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan. dengan menyerahkan urusan keada ahlinya, kita dapat menghindari kekacauan, kerugian dan bahkan tanda kiamat.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ketimpangan kualitas tenaga pendidik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Tingginya jumlah guru tidak tetap, rendahnya kualifikasi akademik, dan distribusi yang tidak merata menunjukkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya merata dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, profesionalisme bukan hanya soal gaji dan status, tetapi tentang akuntabilitas, kompetensi, dan komitmen terhadap kualitas pembelajaran. Namun demikian, profesionalisme pun tidak luput dari kritik. Terkadang, beban administrasi, birokrasi, dan sistem sertifikasi yang terlalu teknis membuat guru terjebak dalam rutinitas tanpa ruh pendidikan. Semangat pengabdian yang dulu menjadi fondasi profesi ini perlahan digantikan oleh orientasi formalitas dan kepatuhan terhadap sistem yang kaku. Di sinilah letak titik kritis dikotomi: relawan hadir dengan idealisme, sementara profesional terjebak dalam sistem yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai luhur pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga menuntut profesionalisme. Profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan bukan hanya sekadar peran fungsional, melainkan profesi yang mensyaratkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesionalisme menekankan pentingnya standar mutu, sistem pelatihan berkelanjutan (continuous professional development), serta kesejahteraan sebagai bentuk jaminan keberlangsungan peran.

Ketika relawan dan profesional bertemu dalam ruang pendidikan, sering terjadi ketegangan. Relawan dianggap tidak kompeten, sementara profesional dipandang terlalu kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Di beberapa daerah, kehadiran guru relawan bahkan sempat menimbulkan gesekan dengan guru tetap karena dianggap mengancam posisi kerja atau menurunkan standar profesi.

Kerelawanan sering dijadikan “tambal sulam” oleh negara dalam menutupi kekurangan tenaga pendidik. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural karena negara seolah melempar tanggung jawab pelayanan dasar kepada masyarakat sipil. Padahal, pendidikan adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara.

Isu lainnya adalah soal penghargaan. Banyak relawan yang bekerja tanpa insentif, tanpa perlindungan hukum, dan tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Di sisi profesional, tuntutan terhadap akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi kinerja sering tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang sepadan. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan struktural dan menimbulkan rasa ketidakpuasan di kedua belah pihak (Kompas, 2020).

Alih-alih mempertentangkan kerelawanan dan profesionalisme, yang perlu dibangun adalah ruang kolaborasi yang adil dan saling melengkapi. Relawan perlu mendapat pelatihan, perlindungan, dan pengakuan agar kontribusinya lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sementara itu, profesional perlu diberdayakan

dengan nilai-nilai humanistik agar tidak sekadar menjadi pelaksana kurikulum, melainkan juga penggerak perubahan sosial.

Beberapa studi menunjukkan bahwa sinergi antara relawan dan profesional dapat meningkatkan efektivitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan sumber daya (UNESCO,2020). Kuncinya adalah pada integrasi peran, pembagian tugas yang jelas, serta adanya regulasi yang mendukung kerja kolaboratif. Sistem pendidikan juga harus mulai mengadopsi pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal, profesional, dan relawan bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang partisipatif dan inklusif.

Dikotomi ini memang seringkali menjadi sumber ketegangan. Relawan dianggap 'pahlawan tak bergaji', sementara profesional dipersepsikan terlalu birokratis dan materialistis. Sebaliknya, relawan kadang dipandang sebagai tenaga pengganti yang mengancam posisi profesional atau memperkuat praktik voluntarisme yang mengabaikan hak-hak pekerja pendidikan. Di sinilah terjadi gesekan antara idealisme dan realitas: idealisme menuntut semangat dan pengorbanan, sedangkan realitas menuntut keberlanjutan dan kesejahteraan (World Bank, 2020).

Pada konteks kebijakan, dilema ini makin nyata. Negara kadang mendorong program-program berbasis kerelawanan sebagai solusi jangka pendek, namun abai pada pembangunan kapasitas profesional secara sistemik. Program seperti pengiriman guru relawan atau pengabdian berbasis komunitas memang memberi dampak positif, namun tidak bisa dijadikan substitusi permanen dari tenaga pendidik yang berstatus resmi, bergaji tetap, dan memiliki jenjang karier. Jika ketergantungan pada relawan terlalu tinggi, maka negara berisiko abai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara terstruktur dan merata. Namun, perlu juga disadari bahwa kerelawanan dan profesionalisme bukanlah dua kutub yang harus selalu dipertentangkan (Rizqi. M,2020). Keduanya justru bisa saling melengkapi. Seorang profesional pun bisa memiliki semangat kerelawanan, dan seorang relawan bisa bertindak dengan standar profesionalisme tinggi. Yang dibutuhkan adalah rekognisi yang adil dan sistem yang inklusif. Relawan perlu mendapat pelatihan, perlindungan, dan pengakuan; sementara profesional perlu tetap terhubung dengan nilai-nilai dasar pendidikan: keikhlasan, keberpihakan pada murid, dan semangat melayani.

Dikotomi kerelawanan dan profesionalisme seharusnya tidak menjadi sekat yang memisahkan, melainkan peluang untuk membangun paradigma pendidikan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Titik temu bisa dicapai dengan memastikan bahwa:

1. Relawan mendapat pelatihan dan pengakuan, bukan hanya sebagai "pemain cadangan", tetapi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang mendukung.
2. Profesional tetap menanamkan semangat kerelawanan dalam praktiknya, dengan tetap menjaga integritas dan kualitas layanan.

3. Kebijakan pendidikan memfasilitasi ruang kolaborasi, bukan kompetisi antarperan, serta menjamin kejelasan status, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
4. Masyarakat diberdayakan sebagai mitra pendidikan, bukan hanya objek layanan, sehingga pendidikan menjadi gerakan kolektif.
Langkah-langkah tersebut harus didukung oleh pendekatan sistemik baik dari sisi kebijakan, pendanaan, maupun perencanaan strategis jangka panjang.

SIMPULAN

Kesimpulan, Mencari titik temu antara kerelawanan dan profesionalisme di dunia pendidikan berarti merumuskan paradigma baru: bahwa pendidikan bukan hanya tentang pekerjaan atau panggilan jiwa semata, melainkan ruang kolaborasi di mana keahlian, empati, dan dedikasi berjalan seiring. Ini adalah ajakan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang menghargai setiap peran, tidak menjadikan relawan sebagai tambal sulam kekurangan sistem, dan tidak membiarkan profesional kehilangan semangat pengabdian. Akhirnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Relawan dan profesional harus duduk dalam satu meja visi, berbagi peran, dan membangun masa depan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Tidak ada yang lebih utama, karena keduanya adalah bagian dari mozaik perubahan yang saling mengisi bukan saling menegasi

DAFTAR RUJUKAN

- Baharuddin, Umiarso, dan Sri Minarti, *Dikotomi Pendidikan Islam; Historitas dan implikasi pada masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 2, 2011
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Laporan Pendidikan Nasional: Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: usat Data dan Statistik Pendidikan, 2022
- Kemendikbudristek, *Laporan Tahunan pendidikan Indonesia: Kaborasi Dalam Transformasi*, Jakarta: Kemendikbudristek 2022
- Kitab Al-'Ilm, **Bab:** Menyampaikan Ilmu kepada Orang yang Memahaminya, Shahih Bukhari no. 59 dalam Fath al- Bari, no. 6496
- Kompas, *Peran Komunitas Literasi dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan*, Kompas.id 2020
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Rizqi. M, *Mewujudkan Kolaborasi Pendidikan antara Relawan dan Profesional..* Jurnal Transformasi Pendidikan, 4 (1), 2021
- Siregar, F, *Relawan Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus Indonesia Mengajar*, Jurnal Pendidkan dan Kebudayaan 25 (3), 2020
- Suryani A, *Tantangan rfesinaisme Guru di Era 4.0*, Jurnal Kependidikan, 49 (2), 2019

UNESCO, *Community Participation and Volunteerism in Education : A Pathway to Inklusif Learning*. Paris: UNESCO Publishing, 2020

World Bank. *Improving Education Service Delivery in Indonesia*, Washington DC: World Bank Group, 2020